



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK &  
PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2019**

JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 21 NOVEMBER 2019

Yang terhormat,

1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin
2. Bapak/Ibu Menteri/Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju,
3. Bapak/Ibu Gubernur se-Indonesia,
4. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
5. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Non Struktural,
6. Bapak/Ibu Rektor Perguruan Tinggi Negeri,
7. Bapak/Ibu Pimpinan BUMN,
8. Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik,
9. Bapak/Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia,
10. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Publik yang hadir,
11. Bapak/Ibu Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan, dan
12. Bapak/Ibu Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 yang saya banggakan.

Assalamualaikum wr. wb

Selamat siang dan salam sejahtera

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.

Bapak Wakil Presiden dan seluruh undangan yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak

KH Ma'ruf Amin, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Bagi kami pentingnya penganugerahan monitoring evaluasi dari Presiden/ Wakil Presiden adalah, Pertama, secara regulasi diatur dalam UU 14 tahun 2008, Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dewan Perwakilan Rakyat RI. Kedua, termotivasinya badan publik dalam melaksanakan UU KIP, sehingga kinerja badan publik meningkat.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,  
Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Adapun Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima), terhadap kuesioner dengan indikator:

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, bahwa tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) Badan Publik, yang melakukan registrasi dalam aplikasi [e-monev.komisiinformasi.go.id](http://e-monev.komisiinformasi.go.id) sebanyak 264 Badan Publik atau 74,37%. Berikut adalah rinciannya:

	<b>Kategori Badan Publik</b>	<b>Jumlah Badan Publik</b>	<b>Jumlah Badan Publik registrasi</b>	<b>Prosentase</b>
1	<b>Perguruan Tinggi Negeri</b>	<b>85</b>	<b>79</b>	<b>92,94%</b>
2	<b>Badan Usaha Milik Negara</b>	<b>109</b>	<b>61</b>	<b>55,96%</b>
3	<b>Lembaga Non Struktural</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>42,11%</b>
4	<b>Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>78,26%</b>
5	<b>Pemerintah Provinsi</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>85,29%</b>
6	<b>Kementerian</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>
7	<b>Partai Politik</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>355</b>	<b>264</b>	<b>74,37%</b>

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,  
Ijinkan kami menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Adapun yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hanya menganugerahi Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif dan Badan Publik Menuju Informatif dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/XI/2019.

Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif.
2. Menuju Informatif.
3. Cukup Informatif.
4. Kurang Informatif.
5. Tidak Informatif.

Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

	<b>Kualifikasi Badan Publik</b>	<b>Informatif</b>	<b>Menuju Informatif</b>	<b>Cukup Informatif</b>	<b>Kurang Informatif</b>	<b>Tidak Informatif</b>
1	Perguruan Tinggi Negeri	5BP	5BP	17BP	21BP	37BP
2	Badan Usaha Milik Negara	1BP	1BP	8BP	6BP	93BP

3	Lembaga Non Struktural	2BP	5BP	5BP	0	26BP
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	6BP	7BP	7BP	7BP	19BP
5	Pemerintah Provinsi	8BP	7BP	4BP	5BP	10BP
6	Kementerian	11BP	9BP	8BP	2BP	4BP
7	Partai Politik	1BP	4BP	4BP	0	0
<b>TOTAL 355 BP</b>		<b>34BP</b>	<b>38BP</b>	<b>53BP</b>	<b>41BP</b>	<b>189BP</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>9,58%</b>	<b>10,70%</b>	<b>14,93%</b>	<b>11,55%</b>	<b>53,24%</b>

Melihat dari prosentase tersebut, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri dan patut dilakukan apresiasi yang tinggi.

Perlu kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan Publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Bapak Wakil Presiden, dan para hadirian yang terhormat,

Sebagai penutup dari laporan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Siti Zuhro, Bapak Dr. Dadang Rahmat, Bapak Harmonis, Ph.D., Bapak Bambang Harymurti, Bapak Ismail Cawidu, Bapak Fredi Tulung, Bapak Nasihin Masha, Bapak Paulus Widiyanto, Bapak Robertus Theodorus, Bapak Yadi Hendriana, Bapak Danardono Sirajudin, dan Bapak Badiul Hadi selaku Tim Penilai dalam tahapan Presentasi Badan Publik pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Terakhir, dalam kesuksesan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2019 ini diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang telah

mengerjakan seluruh proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 ini kami sampaikan, dan kami mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak KH Ma'ruf Amin berkenan untuk memberikan Penganugerahan kepada Badan Publik dengan kualifikasi informatif atas komitmennya dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

(untuk penyampaian nama-nama Badan Publik, disampaikan oleh Panitia, sesuai Abjad)

Wassalammualaikum, Wr, Wb.